



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Analisis Penerapan SAK-EMKM Persediaan Pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian

Sulistian Mangopa^a, Hartati Tuli^b, Muliyani Mahmud^c

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

email: sulistianmangopa@gmail.com^a, hartatituli@yahoo.co.id^b, muliyanim@gmail.com^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 11-07-2020

Revised 27-08-2020

Accepted 30-08-2020

Kata Kunci: SAK EMKM, Persediaan, Usaha Mikro dan Kecil.

Keywords: SAK EMKM, Inventory, Micro and Small Business.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelaku usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian di kelurahan Dutulanaa, kecamatan Limboto telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) tentang persediaan pada usaha mereka dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif serta perbandingan penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM tentang persediaan belum sepenuhnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Masih terdapat beberapa poin yang tidak diterapkan. Adapun perbandingan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro & kecil menunjukkan hasil bahwa usaha kecil lebih unggul jika dibandingkan dengan usaha mikro dengan persentase penerapan sebesar 60,67% atau berada pada rentang kategori Cukup Menerapkan sementara untuk usaha mikro hanya sebesar 40,76% atau Sebagian Kecil Menerapkan.

A B S T R A C T

This study aims to see whether the micro and small businesses in the retail sector of daily goods in the Dutulanaa village office, Limboto sub-district have applied the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Enterprises (SAK EMKM) about inventory in their businesses by using data collection techniques through questionnaires. The technique used is descriptive analysis and comparison of the application of SAK EMKM. Finding reveals that the application of SAK EMKM on inventories was not fully carried out by micro and small businesses. There are still some points that are not applied. The comparison of the application of SAK EMKM in micro & small businesses shows the results that small businesses are superior when compared to micro businesses with the percentage of application of 60.67% or in the range of the category of Simply Applying while for micro businesses only amounting to 40.76% or Small Part Apply.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia lumpuh, perbankan mengalami kebangkrutan karena kredit macet sebesar 30%, pertumbuhan ekonomi yang merosot hingga -13%, rupiah terdevaluasi sampai 90%, inflasi mencapai 78% dan harga makanan melambung hingga 118% serta lebih dari 70% perusahaan yang tercatat dipasar modal mengalami kebangkrutan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan kurang lebih 20 juta pekerja kehilangan pekerjaan sehingga melonjakkan angka pengangguran, disaat genting tersebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdiri kokoh, bertahan dari terpaan krisis moneter sehingga UMKM diakui oleh Menteri Keuangan pada saat itu sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia yang diterjang krisis moneter (Tatik, 2018).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa karena memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja serta menjadi penopang saat terjadinya guncangan krisis ekonomi di Indonesia (Ningtiyas:2017). Akan tetapi seiring dengan pentingnya peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, ada saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan usahanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, serta kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2012). Hal ini juga didukung oleh pendapat Zimmerer dan Scarborough dalam Magfirah & BZ (2016) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, kurangnya pengalaman manajemen, dan kurang stabilnya keuangan akan mengakibatkan tingkat kematian bisnis mikro maupun kecil jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang sudah lebih besar.

Terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Barus, Indrawaty & Solihin (2018) mencoba melihat implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah di UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community dan menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah karena kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang menyelenggarakan pencatatan akuntansi UMKM sehingga mengakibatkan pencatatan akuntansi hanya dibuat secara sederhana. Selain itu, fokus pelaku UMKM hanya kepada peningkatan penjualan dan belum terfokus pada pencatatan yang lebih akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barus *et al.*, 2018 yang hanya melihat implementasi SAK EMKM pada UMKM, penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM atau belum. Penelitian ini hanya berfokus pada usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian yang ada di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto karena mengingat jenis UMKM yang paling banyak di daerah ini dan memenuhi kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 hanya jenis usaha mikro dan kecil. Sementara untuk usaha menengah belum ditemukan yang sesuai dengan

kriteria yang diatur dalam Undang Undang tersebut. Penelitian ini dilakukan karena mengingat peran persediaan yang begitu vital dalam operasional sebuah perusahaan terutama dalam usaha mikro & kecil yang belum dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu sehingga pencatatan yang sederhana di usaha mikro & kecil masih dapat diterima. Akan tetapi pengelolaan persediaan harus selalu diperhatikan karena persediaan merupakan penopang bagi usaha mikro & kecil serta merupakan sumber perolehan kas utama bagi jenis usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prempeh (2015) yang menyatakan bahwa persediaan merupakan sumber utama pendapatan sehingga pengelolaan persediaan yang baik akan memberikan *profit* bagi perusahaan.

Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan memperoleh kas dari aktivitas penjualan persediaan, jika persediaan terjual dengan cepat maka perolehan kas juga akan semakin cepat dan lancar. Barchelino (2016) menyatakan bahwa semua aktivitas operasional perusahaan memprioritaskan pada usaha untuk melikuidasi persediaan menjadi kas. Perusahaan yang dapat mengendalikan sistem persediaannya dengan tepat akan memudahkan perusahaan untuk bertahan dalam kegiatan operasional dan menjaga kelancaran operasi perusahaan. Untuk itu persediaan barang menjadi hal yang penting, sebab sukses tidaknya perencanaan dan pengawasan persediaan akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya pada penentuan keuntungan perusahaan. Perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar pada persediaan karena tanpa persediaan, para pengusaha akan menghadapi resiko perusahaannya pada suatu waktu tidak lagi dapat memenuhi permintaan pelanggan (Nurlaila, 2017). Sehingga persediaan memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan usaha sebuah perusahaan baik usaha skala besar, menengah atau bahkan usaha kecil.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia juga memiliki persediaan yang harus dijual dan dikelola dengan baik agar mendatangkan keuntungan. Sehingga pengelolaan persediaan pada UMKM juga harus diperhatikan. Sharma (2010) mengatakan bahwa pengelolaan persediaan sangat penting dalam pengelolaan operasional. Namun yang menjadi permasalahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya pengetahuan tentang *inventory management* atau pengelolaan persediaan yang baik. Standar mengenai persediaan diatur dalam PSAK No 14 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, selain itu persediaan juga diatur dalam SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) Bab 11 yang disahkan pada 19 Mei 2009. Setelah itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia menyadari bahwa keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara manfaat tepat guna diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga diterbitkanlah SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang disahkan per 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada 1 Januari 2018. Dalam SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah) Bab 9 hal 21 dijelaskan mengenai ruang lingkup, pengakuan dan pengukuran serta penyajian persediaan untuk UMKM. Akan tetapi, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum memahami standar atau pedoman tersebut yang kemudian

berimbang pada tidak diterapkannya standar tersebut pada usaha mereka. Sehingga masih banyak ditemukan para pelaku usaha yang harus menderita kerugian akibat banyaknya beban yang timbul dari persediaan, misalnya beban kerusakan persediaan akibat tidak terjual dan habis masa layak pakainya (*expired*). Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan tentang *inventory management* yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan SAK-EMKM Persediaan pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto”.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) merupakan standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia atas dasar kesadaran tentang keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang merupakan pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara manfaat tepat guna diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga diterbitkanlah SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang disahkan per 24 Oktober 2016 dan mulai efektif pada 1 Januari 2018 (SAK, 2018).

SAK EMKM Bab 9 mengatur tentang persediaan. Dalam bab ini terdapat beberapa poin mengenai persediaan, yaitu :

1. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup dijelaskan secara singkat bahwa bab ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran dan penyajian persediaan. Selain itu dijelaskan bahwa persediaan adalah aset :

- a) Untuk dijual dalam kegiatan normal;
- b) Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
- c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

2. Pengakuan dan Pengukuran

- a) Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya
- b) Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan
- c) Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan
- d) Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan.

3. Penyajian

- a) Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan
- b) Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia. UMKM terbagi atas 3 kelompok besar usaha yaitu usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun kriteria UMKM yang diatur dalam UU No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008

NO	USAHA	KRITERIA	
		ASSET	OMSET
1	MIKRO	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau	Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2	KECIL	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3	MENENGAH	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Persediaan

1. Definisi Persediaan

Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau di proses lebih lanjut (Rudianto, 2012:222). Sedangkan menurut Baridwan (2015:149) persediaan barang adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Persediaan barang dagang diartikan sebagai barang yang diperoleh perusahaan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan (Indroprasto & Suryani, 2012). Sementara Kieso *et al*, (2008:402) menjelaskan bahwa persediaan (*inventory*) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aktiva perusahaan yang tersedia untuk dijual atau di olah terlebih dahulu dalam kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan memperoleh pendapatan.

2. Jenis-Jenis Persediaan

Perusahaan dagang yang aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang jadi, memiliki persediaan dalam bentuk barang jadi atau barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur yang harus memroses bahan baku hingga menjadi barang jadi, memiliki tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi (Rudianto, 2012:222). Heizer dan Render

(2010) dalam (Lahu, 2017) menyatakan bahwa ada 4 jenis persediaan yaitu :

1. Persediaan bahan mentah (*raw material inventory*)
2. Persediaan barang setengah jadi (*work in process*)
3. Persediaan pasokan pemeliharaan/perbaikan/operasi (*maintenance, repair, operating*)
4. Persediaan barang jadi (*finished good inventory*).

3. Metode Pencatatan Persediaan

Ada dua metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan, yaitu metode periodik atau fisik dan metode perpetual. Metode pencatatan persediaan menurut Darwati, Slamet & Maimunah (2015) antara lain yaitu :

1. Metode Fisik

Dalam sistem ini perusahaan tidak menyediakan kartu-kartu untuk mencatat persediaan barang dagangan. Untuk mengetahui nilai persediaan barang dagangan pada suatu saat tertentu diperlukan perhitungan fisik persediaan. Sementara menurut Erhans (2010) dalam Budianto & Ferriswara, (2017) dalam periode pencatatan periodik, harga atas barang dagangan yang dijual (HPP) dihitung dengan cara : persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir.

2. Metode Perpetual

Menurut Budianto & Ferriswara (2017) perpetual atau terus-menerus (*continue*) yaitu mencatat persediaan secara berkelanjutan. Jadi, setiap ada transaksi pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung di rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi.

4. Metode Penilaian Persediaan

Metode penilaian persediaan menurut Pontoh (2013) dalam Budianto & Ferriswara (2017) mengalokasikan total biaya persediaan yang tersedia dan yang dijual. Metode ini terdiri dari empat metode paling umum yaitu :

a. Identifikasi Khusus

Metode ini memiliki keunggulan dalam menentukan secara tepat biaya persediaan per unit yang terjual, dan menentukan secara tepat nilai persediaan akhir yang tersisa dalam gudang. Hal ini disebabkan karena unit persediaan yang akan dijual dapat diidentifikasi terpisah secara tepat. Akan tetapi, metode ini menjadi tidak praktis ketika diterapkan dalam organisasi bisnis yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan eceran.

b. Metode Biaya Rata-rata

Metode ini mengasumsikan bahwa harga beli sebuah persediaan yang dibeli terakhir akan menjadi beban pokok penjualan terlebih dahulu, pada saat terjadinya transaksi penjualan. Nilai persediaan yang akan dilaporkan adalah berdasarkan harga beli persediaan pada awal persediaan. Menurut Reeve et al., (2012:351) dalam metode ini, barang yang dikeluarkan/dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata.

c. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO)

Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, dan barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang tersisa sebagai persediaan.

d. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama

Dalam metode ini, barang yang masuk (dibeli/diproduksi) paling akhir akan dikeluarkan/dijual paling awal, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode (Rudianto, 2012:224). Sementara Reeve *et al* (2012:350) menyatakan bahwa saat metode LIFO digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian terakhir.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Model atau desain penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Nazir, 2014:43).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 49 usaha yang ada di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*. Peneliti menentukan sampel penelitian ini berjumlah 30 yang terbagi atas : 15 usaha mikro & 15 usaha kecil yang ditemui secara insidental oleh peneliti untuk mendapatkan perbandingan yang seimbang.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:102). Setiap instrumen memiliki skala pengukuran. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah skala interval. Skala interval dalam penelitian ini menggunakan skala lima poin yang dijabarkan sebagai berikut (Sekaran, 2006:18) :

Tabel 2.
Instrumen Skala Interval 5 poin

No	Item Kuesioner	Skor
1	Menerapkan Sepenuhnya	5
2	Sebagian Besar Menerapkan	4
3	Cukup Menerapkan	3
4	Sebagian Kecil Menerapkan	2
5	Tidak Menerapkan Sama Sekali	1

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dari hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sementara dari hasil uji *Cronbach Alpha*, nilai yang didapatkan adalah 0,770 atau sekitar 77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan dalam instrumen/kuesioner yang digunakan valid dan reliabel.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Tentang Persediaan

Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah tentang persediaan, dilakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala interval. Pernyataan untuk penerapan SAK EMKM terdiri dari 3 Indikator yaitu Ruang Lingkup, Pengakuan & Pengukuran, dan Penyajian yang tersebar dalam 14 butir pernyataan. Adapun hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan SAK EMKM tentang persediaan pada Usaha Mikro

Tabel 3.

Hasil Perhitungan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan Pada Usaha Mikro

Pernyataan	Persentase	Kriteria
Pernyataan 1 : Persediaan adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali	81,33 %	Menerapkan Sepenuhnya
Pernyataan 2 : Persediaan (barang) yang dibeli pertama kali adalah yang pertama kali dijual	50,67 %	Cukup Menerapkan
Pernyataan 3 : Persediaan yang tersedia di toko diakui sebesar jumlah semua biaya yang dikeluarkan saat membeli persediaan	25,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 4 : Saat membeli barang, biaya angkut pembelian (bayar bentor, ojek dsb) dihitung sebagai penambah harga pokok produk (harga yang diperoleh dari penjumlahan semua biaya yang timbul sampai barang tsb siap dijual	26,67 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 5 : Diskon/Potongan harga yang didapatkan ketika membeli barang untuk dijual mengurangi harga pokok produk	24 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 6 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga pokok produk	33,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 7 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	30,67 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 8 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga pokok produk.	37,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 9 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	29,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 10 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok produk yang dijual.	22,67 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 11 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	25,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan

Tabel 3. (Lanjutan)
Hasil Perhitungan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan Pada Usaha Mikro

Pernyataan 12 : Persediaan harus di catat/disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset/harta	20 %	Tidak Menerapkan Sama Sekali
Pernyataan 13 : Jika terdapat persediaan yang kadaluarsa maka produk tersebut harus dibuang	82,67 %	Menerapkan Sepenuhnya
Pernyataan 14 : Produk yang kadaluarsa membuat penghasilan sedikit karena harus dibuang	81,33 %	Menerapkan Sepenuhnya
Rata-Rata	40,76 %	Sebagian Kecil Menerapkan

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

2. Penerapan SAK EMKM tentang persediaan pada Usaha Kecil

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan Pada Usaha Kecil

Pernyataan	Persentase	Kriteria
Pernyataan 1 : Persediaan adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali	90,67 %	Menerapkan Sepenuhnya
Pernyataan 2 : Persediaan (barang) yang dibeli pertama kali adalah yang pertama kali dijual	89,33 %	Menerapkan Sepenuhnya
Pernyataan 3 : Persediaan yang tersedia di toko diakui sebesar jumlah semua biaya yang dikeluarkan saat membeli persediaan	66,67 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 4 : Saat membeli barang, biaya angkut pembelian (bayar bentor,ojek dsb) dihitung sebagai penambah harga pokok produk (harga yang diperoleh dari penjumlahan semua biaya yang timbul sampai barang tsb siap dijual.	61,33 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 5 : Diskon/Potongan harga yang didapatkan ketika membeli barang untuk dijual mengurangi harga pokok produk	46,67 %	Cukup Menerapkan
Pernyataan 6 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga pokok produk	60 %	Cukup Menerapkan
Pernyataan 7 : Biaya tenaga kerja langsung (pekerja) ditambahkan pada harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	58,67 %	Cukup Menerapkan
Pernyataan 8 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga pokok produk.	38,67 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 9 : Biaya Listrik dianggap sebagai penambah harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	42,67 %	Cukup Menerapkan
Pernyataan 10 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok produk yang dijual.	62,67 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 11 : Jika timbul biaya yang tak terduga dalam proses pembelian barang untuk persediaan. Biaya tersebut ditambahkan ke dalam harga jual produk (harga pokok + keuntungan yang diinginkan)	57,33 %	Cukup Menerapkan

Tabel 4. (Lanjutan)
Hasil Perhitungan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan Pada Usaha Kecil

Pernyataan 12 : Persediaan harus di catat/disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset/harta	25,33 %	Sebagian Kecil Menerapkan
Pernyataan 13 : Jika terdapat persediaan yang kadaluarsa maka produk tersebut harus dibuang	76 %	Sebagian Besar Menerapkan
Pernyataan 14 : Produk yang kadaluarsa membuat penghasilan sedikit karena harus dibuang	73,33 %	Sebagian Besar Menerapkan
Rata-Rata	60,67 %	Cukup Menerapkan

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

3. Perbandingan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan pada Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 5.
Perbandingan Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan Pada Usaha Mikro & Kecil

Nomor Pertanyaan	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Pernyataan 1	81,33 %	90,67 %
Pernyataan 2	50,67 %	89,33 %
Pernyataan 3	25,33 %	66,67 %
Pernyataan 4	26,67 %	61,33 %
Pernyataan 5	24 %	46,67 %
Pernyataan 6	33,33 %	60 %
Pernyataan 7	30,67 %	58,67 %
Pernyataan 8	37,33 %	38,67 %
Pernyataan 9	29,33 %	42,67 %
Pernyataan 10	22,67 %	62,67 %
Pernyataan 11	25,33 %	57,33 %
Pernyataan 12	20 %	25,33 %
Pernyataan 13	82,67 %	76 %
Pernyataan 14	81,33 %	73,33 %
Rata-Rata	40,76 %	60,67 %
Kategori	Sebagian Kecil Menerapkan	Cukup Menerapkan

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang paling diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil adalah indikator pertama pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil & Menengah (SAK EMKM) yaitu ruang lingkup yang berisi definisi dari persediaan. Definisi persediaan menurut SAK EMKM adalah aset yang tersedia untuk dijual, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam hal ini, persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh

usaha mikro dan kecil sektor ritel barang harian di kelurahan Dutulanaa adalah barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali tanpa mengalami proses pengolahan barang. Sehingga perlakuan barang dagangan pada jenis usaha ini sejalan dengan penelitian Barchelino (2016) yaitu dibeli, disimpan dan dijual.

Selanjutnya indikator kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan hasil penelitian, indikator ini memiliki tingkat penerapan yang rendah pada usaha mikro sementara usaha kecil memiliki tingkat penerapan yang lebih baik walaupun tidak diterapkan sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Maghfirah & BZ (2016) yang menganggap bahwa semakin besar skala sebuah usaha maka pengelolaan usahanya akan lebih baik karena memiliki pemahaman serta sumber daya manusia yang lebih baik daripada usaha yang berskala kecil.

Indikator terakhir adalah penyajian yang dilihat dari dua poin. Poin pertama adalah penyajian akun persediaan pada laporan posisi keuangan. Dalam hal ini baik usaha mikro maupun usaha kecil tidak menerapkan sama sekali pencatatan persediaan dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset. Hal ini sejalan dengan penelitian Aminatul (2019), Barus, et.,al (2018), Putra (2018), Judianto, et.,al (2018), Ismadewi, et.,al (2017) yang mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh kebanyakan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kurangnya pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar, serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Poin kedua yaitu mengenai beban persediaan yaitu sisa persediaan harus diakui sebagai beban di periode pendapatan yang terkait. Poin ini cenderung lebih diterapkan oleh pelaku usaha mikro, karena kebanyakan pelaku usaha mikro membeli persediaan dari toko yang tidak melayani retur barang rusak atau kadaluarsa. Sehingga sisa barang yang kadaluarsa harus dibuang dan mempengaruhi pendapatan. Sementara usaha kecil banyak melakukan pembelian dari agen resmi atau *distribution center* sehingga jika ada barang yang rusak atau kadaluarsa dapat dikembalikan tanpa mempengaruhi pendapatan dari pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Sahila & Armin (2019) yang mengungkapkan bahwa jika terdapat barang yang rusak atau bahkan terdapat ketidakcocokan antara barang yang dipesan dan diterima, maka pihak toko akan segera melakukan pengembalian (retur) ke *distribution center*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku usaha mikro & kecil sektor ritel barang harian di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) tentang persediaan pada pengelolaan persediaan mereka. Indikator yang paling diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil hanya indikator pertama yaitu ruang lingkup, sementara indikator yang paling tidak diterapkan adalah indikator ketiga yaitu penyajian persediaan pada laporan posisi keuangan bagian aset. Jika di lihat dari perbandingan antara penerapan SAK EMKM tentang pengelolaan persediaan pada usaha mikro dan usaha kecil, maka usaha kecil memiliki nilai persentase penerapan lebih unggul dibandingkan dengan usaha mikro. Usaha kecil telah berada pada kategori cukup menerapkan, sementara usaha mikro masih berada pada kategori sebagian kecil menerapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku Usaha Mikro & Kecil sektor Ritel Barang Harian di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto agar selalu memperhatikan pengelolaan persediaannya karena persediaan memegang peranan penting dalam keberlangsungan jenis usaha seperti ini.
2. Penerapan SAK EMKM tentang Persediaan pada Pelaku Usaha Mikro & Kecil sektor Ritel Barang Harian sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan keuntungan dan menjaga kestabilan usaha, sehingga para pelaku usaha mikro & kecil harus menerapkan standar tersebut.
3. Pentingnya bagi pemerintah baik daerah maupun pusat untuk lebih memperhatikan eksistensi dari usaha mikro & kecil dengan melakukan berbagai pelatihan tentang pengelolaan usaha khususnya tentang pengelolaan persediaan demi keberlangsungan jenis usaha ini yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiani, Y. (2017). Pengaruh Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Barchelino, R. (2016). Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada PT . Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal EMBA*, 4(14), 837–846.
- Baridwan, Z. (2015). *Intermediate Accounting* (8th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Barus, I. N. E., Indrawaty, A., & Solihin, D. (2018). Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community. *Journal of Accounting and Bussiness Management (RJABM)*, 2(2), 176–183. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budianto, H., & Ferriswara, D. (2017). Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang menurut SAK ETAP pada CV. TJIPTO PUTRA MANDIRI INDONESIA. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 20(2), 124–138.
- Darwati, A., Slamet, B., & Maimunah, S. (2015). *Analisis perlakuan akuntansi atas persediaan barang dagang terhadap penyajian akun persediaan pada koperasi karyawan goodyear*. 1–10.
- Indroprasto, & Suryani, E. (2012). Analisis Pengendalian Persediaan Produk Dengan Metode EOQ Menggunakan Algoritma Genetika untuk Mengefisiensikan Biaya Persediaan. *Jurnal Teknik ITS*, 1, A305–A309.
- Ismadewi, N. K., Herawati, N. T., & Atmaja, A. T. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten

- Tabanan). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Judianto, R., Ismunawan, & Rahman, A. N. (2018). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SEK-EMKM) pada UKM Davin Decor Surakarta. *JAB*, 4(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Karim, U. K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Ujian Certified Publik Accountant (CPA) Indonesia (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. *Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Lahu, E. P. (2017). Analisis Pengendalian Bahan Baku Guna Meminimalkan Biaya Persediaan Pada Dunkin Donuts Manado. *Jurnal EMBA*, 5(3), 4175–4184. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18394/17922>
- Maghfirah, M., & BZ, F. S. (2016). Analisis perhitungan harga pokok produksi dengan penerapan metode full costing pada umkm kota banda aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 59–70.
- Mousavi, S. M., Hajipour, V., Niaki, S. T. A., & Aalifar, N. (2014). A Multi-Product Multi-Period Inventory Control Problem under Inflation and Discount: A Parameter-Tuned Particle Swarm Optimization Algorithm. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, (February). <https://doi.org/10.1007/s00170-013-5378-y>
- Muchid, A. (2012). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus pada UD . Mebel Novel ' 1 di Banyuwangi). Preparation of Financial Statements UMKM Financially Accounting Standards- Entitie. *Universitas Jember*.
- Munggaran, R. D. (2012). *Pemanfaatan Open Source Software Pendidikan Oleh Mahasiswa Dalam Rangka Implementasi Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. (19), 73. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.00955.x>
- Mutiah, R. A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223–229.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningtiyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Nurlaila, I. (2017). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal pada Persediaan Barang Jadi di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta*. 200.
- Prempeh, K. B. (2015). The Impact of Efficient Inventory Management on Profitability: Evidence from Selected Manufacturing Firms in Ghana. *International Journal of Finance and Accounting*.

- <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20160501.03>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 201–217. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>
- Reeve, J. M., Warren, C. S., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Soepriyanto, G., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2012). *Principles of Accounting-Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahila., & Kusminaini, A. (2019). Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagangan pada Toko Alfamart SAT BOOM Baru Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 8(1), 31-56
- SAK. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- SAK EMKM. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, Mikro & Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sekaran, U. (2006). *Research Method For Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 2* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sharma, S. (2010). Policies concerning decisions related to quality level. *International Journal of Production Economics*, 125(1), 146–152. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.01.015>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supit, T., & Jan, A. H. (2015). Analisis persediaan bahan baku pada industri mebel di desa leilem. *Jurnal EMBAEMBA*, 3(1), 1230–1241.
- Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.260>
- Ziukov, S. (2015). A literature review on models of inventory management under uncertainty. *Business Systems & Economics*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.13165/vse-15-5-1-03>